



BerAKHLAK **#** bangga
melayani
bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**RENCANA KERJA
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK
TAHUN ANGGARAN 2024**

**BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN GRESIK
2023**



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 050/56 /HK/437.12/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin keselarasan pembangunan secara efektif, efisien, dan bersasaran, diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka Persiapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu disusun rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;



11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik;
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 93 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

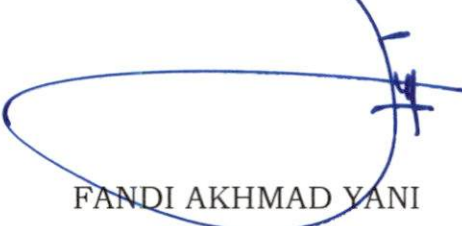
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 9 Januari 2023

BUPATI GRESIK,



FANDI AKHMAD YANI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 050/ ~~56~~ /HK/437.12/2023

TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
1.	Ketua	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.	a. bertanggungjawab terhadap aktifitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024; dan b. memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024.
2.	Sekretaris	Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.	a. mengkoordinasi dan memfasilitasi serta mengawasi dan memantau keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Kelompok Kerja Rencana Kerja Tahun 2024;



NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
			b. membantu Ketua Tim dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja-PD) Tahun 2024; dan c. mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan Tim penyusun Rencana Kerja (Renja-PD) Tahun 2024 kepada Ketua Tim.
3.	Kelompok Kerja I Perumusan Rencana Kerja Bidang Anggaran Daerah a. Ketua : b. Anggota :	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik. 1) Kepala Subbidang Anggaran Daerah I pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik; 2) Kepala Subbidang Anggaran Daerah II pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik; dan	a) melakukan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Bidang Anggaran Daerah; b) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Anggaran Daerah; c) melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Bidang Anggaran Daerah; d) melakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD lingkup Bidang Anggaran Daerah;



NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
		3) Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.	e) melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Bidang Anggaran Daerah; dan f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 beserta kerangka pendanaan Bidang Anggaran Daerah.
4.	Kelompok Kerja II Perumusan Rencana Kerja Bidang Perbendaharaan a. Ketua : b. Anggota :	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik. 1) Kepala Subbidang Penerimaan Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik; 2) Kepala Subbidang Pengeluaran Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik; dan	a) melakukan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Bidang Perbendaharaan; b) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Perbendaharaan; c) melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Bidang Perbendaharaan; d) melakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD lingkup Bidang Perbendaharaan; e) melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Bidang Perbendaharaan; dan



NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
		3) Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.	f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 beserta kerangka pendanaan Bidang Perbendaharaan.
5.	<p>Kelompok Kerja III Perumusan Rencana Kerja Bidang Pengelolaan Aset Daerah</p> <p>a. Ketua :</p> <p>b. Anggota :</p>	<p>Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.</p> <p>1) Kepala Subbidang Penilaian, Pemindahtanganan dan Penghapusan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik;</p> <p>2) Kepala Subbidang Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik; dan</p>	<p>a) melakukan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Bidang Pengelolaan Aset Daerah;</p> <p>b) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Pengelolaan Aset Daerah;</p> <p>c) melakukan telahaan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Bidang Pengelolaan Aset Daerah;</p> <p>d) melakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD lingkup Bidang Pengelolaan Aset Daerah;</p> <p>e) melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Bidang Pengelolaan Aset Daerah; dan</p>



NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
		3) Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.	f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 beserta kerangka pendanaan Bidang Pengelolaan Aset Daerah.
6.	Kelompok Kerja IV Perumusan Rencana Kerja Bidang Pengembangan dan Informasi Pendapatan Daerah a. Ketua : b. Anggota :	Kepala Bidang Pengembangan dan Informasi Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik. 1) Kepala Subbidang Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik; 2) Kepala Subbidang Advokasi dan Regulasi pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik; dan	a) melakukan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Bidang Pengembangan dan Informasi Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik; b) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Pengembangan dan Informasi Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik; c) melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Bidang Pengembangan dan Informasi Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik;



NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
		3) Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.	d) melakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD lingkup Bidang Pengembangan dan Informasi Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik; e) melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Bidang Pengembangan dan Informasi Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik; dan f) Merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 beserta kerangka pendanaan Bidang Pengembangan dan Informasi Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik.
7.	Kelompok Kerja V Perumusan Rencana Kerja Bidang Pendapatan Daerah PBB dan BPHTB a. Ketua :	Kepala Bidang Pendapatan daerah Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.	a) melakukan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Bidang Pendapatan Daerah Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;



NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
	b. Anggota :	<ol style="list-style-type: none">1) Kepala Subbidang Pendataan dan Verifikasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik;2) Kepala Subbidang Penetapan dan Penilaian pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik; dan3) Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.	<ol style="list-style-type: none">b) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Pendapatan Daerah Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;c) melakukan telahaan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Bidang Pendapatan Daerah Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;d) melakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD lingkup Bidang Pendapatan Daerah Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;e) melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Bidang Pendapatan Daerah Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan



NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
			f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 beserta kerangka pendanaan Bidang Pendapatan Daerah Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
8.	Kelompok Kerja VI Perumusan Rencana Kerja Bidang Pajak Daerah Lainnya a. Ketua : b. Anggota :	Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik; 1) Kepala Subbidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik; 2) Kepala Subbidang Penetapan dan Pemeriksaan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik; dan	a) melakukan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Bidang Pajak Daerah Lainnya; b) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Pajak Daerah Lainnya; c) melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Bidang Pajak Daerah Lainnya; d) melakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD lingkup Bidang Pajak Daerah Lainnya;



NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
		3) Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.	e) melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Bidang Pajak Daerah Lainnya; dan f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 beserta kerangka pendanaan Bidang Pajak Daerah Lainnya.
9.	Kelompok Kerja VII Perumusan Rencana Kerja Sekretariat a. Ketua : b. Anggota :	Perencana Ahli Muda pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik. 1) Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik; 2) Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik; dan	a) melakukan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Sekretariat; b) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Sekretariat; c) melakukan telahaan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Sekretariat; d) melakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD lingkup Sekretariat;



NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
		3) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.	e) melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Sekretariat; dan f) Merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 beserta kerangka pendanaan Sekretariat.
10.	Kelompok Kerja VIII Perumusan Rencana Kerja Lintas Sektoral a. Ketua : b. Anggota:	Perencana Ahli Muda pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.	a) melakukan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Lintas Sektoral; b) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Lintas Sektoral; c) melakukan telahaan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Lintas Sektoral; d) melakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD lingkup Lintas Sektoral;



NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
			e) melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Lintas Sektoral; dan f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 beserta kerangka pendanaan lingkup Lintas Sektoral.

BUPATI GRESIK,



FANDI AKHMAD YANI



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan tingkat perangkat daerah yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 sesuai tugas dan fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik yang tertuang pada Peraturan Bupati Gresik Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.

Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 merupakan pedoman bagi rencana kerja tahun ketiga atas pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026 dan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024

Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan pada Tahun 2024 berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah yang melibatkan *stakeholders* pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 ini mengakomodasi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pemgelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahu 2010 Tentang Pelaksanaan PP Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini, semoga dapat diimplementasikan sebaik-baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan dokumen rencana kerja ini disampaikan terima kasih. Namun demikian berbagai upaya korektif bagi penyempurnaan Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik pada masa mendatang senantiasa diharapkan masukan dan kritik dari semua pihak.

Gresik,
KEPALA BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN GRESIK



A.M REZA PAHLEVI, A.P
Pembina Tk. I
NIP 19740803 199311 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	10
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	30
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	34
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	48
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	48
3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	49
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	62
BAB V PENUTUP	70

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	<i>Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022</i>	12
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.....	30
Tabel 2.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024	36
Tabel 2.7	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024	50
Tabel 2.8	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah dan terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan jangka panjang, menengah serta perencanaan tahunan. Pada tingkat Perangkat Daerah (PD) berupa dokumen perencanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) serta Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD).

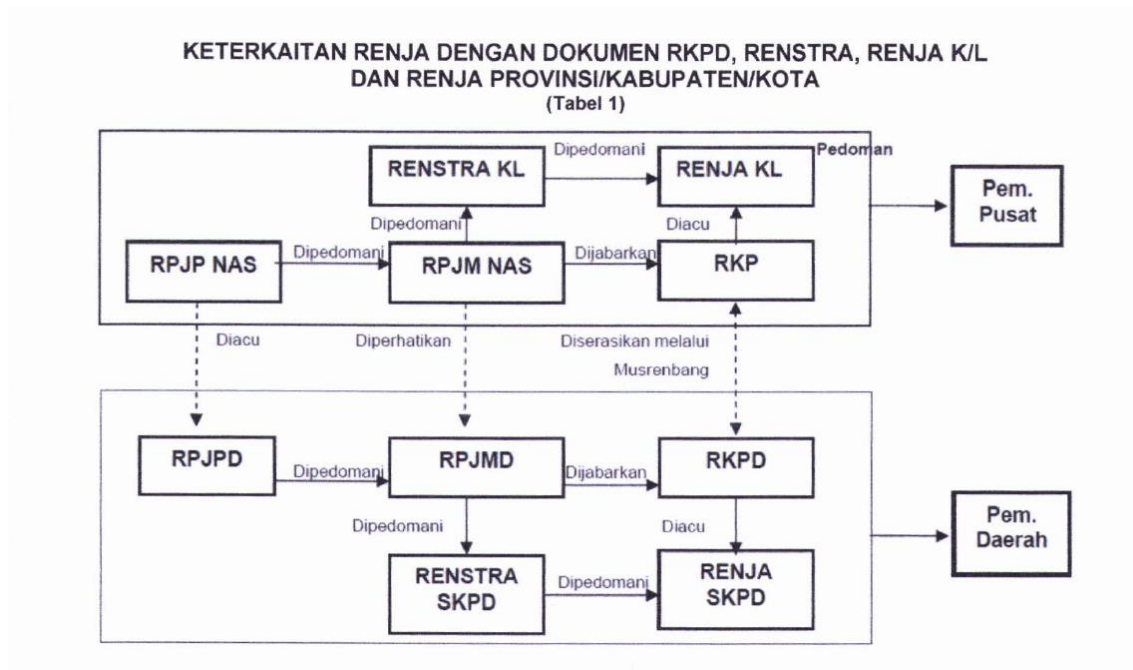
Penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini mengacu pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021-2026. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024
3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum

dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari Kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2024 ini merupakan tahun keempat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra)

Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah, Dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai berikut:



1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1540);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6113);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 20. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
 21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186)
 22. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
 23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80

- Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1030);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 505);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
38. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor Seri E);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 6);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 2);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
44. Peraturan Bupati Gresik Nomor 66 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik;
45. Peraturan Bupati Gresik Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026;
46. Peraturan Bupati Gresik 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik pada Tahun Anggaran 2024.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) ini adalah:

1. Untuk mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang tertuang dalam Perubahan Renstra BPPKAD Tahun 2021-2026;

2. Sebagai acuan bagi seluruh komponen Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam pelaksanaan kinerja Tahun 2024;
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024;
4. Menciptakan kepastian kebijakan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dan pengelolaan keuangan yang efisien, transparan dan akuntabel.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gresik pada Tahun 2022 pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah dialokasikan dana sebesar Rp 932.628.447.172 (sembilan ratus tiga puluh dua milyar enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) untuk melaksanakan 4 (empat) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 45 (lima puluh tiga) sub kegiatan. Setelah Perubahan APBD Tahun 2022, anggaran untuk Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjadi sebesar Rp 1.011.641.623.743 (satu trilyun sebelas milyar enam ratus empat puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) untuk melaksanakan 4 (empat) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 45 (lima puluh satu) sub kegiatan. Dari Anggaran sebesar Rp 1.011.041.623.743 (satu trilyun sebelas milyar empat puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) untuk melaksanakan 4 (empat) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 45 (lima puluh satu) terealisasi sebesar Rp. 963.670.986.868,91 (sembilan ratus enam puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh delapan Sembilan puluh satu sen rupiah) sehingga terdapat anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 47.370.636.874,09 (empat puluh tujuh milyar tigaratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh empat sembilan sen rupiah). Tidak terserapnya anggaran tersebut sebagian besar merupakan efisiensi penggunaan dana kegiatan. Dilihat dari kinerja anggarannya tercapai sebesar 95,31 % (sembilan puluh lima koma tujuh tiga puluh satu persen) dengan kategori prestasi *Sangat Tinggi*.

Sedangkan untuk tahun anggaran berjalan Tahun 2023, anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp. 972.634.906.414,00 (Sembilan ratus tujuh puluh dua milyar enam ratus tiga puluh empat

juta Sembilan ratus enam ribu empat ratus empat belas rupiah) yang dialokasikan untuk melaksanakan 4 program dengan 11 kegiatan dan 43 sub kegiatan, sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 (T-C.29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

Kabupaten Gresik

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun(n- 3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun (n- 1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD tahun (n- 2) 2022	Realisasi Renja PD Tahun (n- 2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun (n-1) 2023 %	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	9	10	(11)=(10)/(4)
				Target 2021	Target 2022			Target 2023		
5	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
05.02	KEUANGAN									
05.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	- Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
05.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	36 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	17 Dokumen	47%

05.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	6 Dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%		6 Dokumen	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen					3 Dokumen	3 Dokumen	25%
05.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Dokumen	2 Dokumen					2 Dokumen	200%
05.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%		4 Dokumen	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen					2 Dokumen	2 Dokumen	25%
05.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan	60 Bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	18 bulan	30%
05.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan tersedianya gaji dan tunjangan	24 Bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%		24 Bulan	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang/bulan					120 Orang/bulan	120 Orang/bulan	100%
05.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakaian yang disediakan	1 Paket							
05.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian yang disediakan	546 Stel	-	-	-			-	0%

	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket						-	0%
05.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	60 Bulan		12 Bulan			12 Bulan		
05.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	3516 Buah	1.758 buah	2954 buah	900 buah	30%		2658 Buah	76%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket					1 Paket	1 Paket	25%
05.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	31172 Buah	15.586 buah	13673 buah	11831 buah	87%		27417 buah	176%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket					5 Paket	5 Paket	25%
05.02.01.2.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	764 Buah	371 buah	1044 buah	753 buah	72%		1124 Buah	147%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	36 Paket					9 Paket	9 Paket	25%
05.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya penyediaan bahan logistik	24 Bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%		24 Bulan	100%

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48 paket					12 paket	12 paket	25%
05.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan yang disediakan	96 Jenis	48 jenis	58 jenis	12 jenis	21%		60 Jenis	63%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaanyang Disediakan	8 Paket					2 Paket	2 Paket	25%
05.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	10 Jenis	4 jenis	8 jenis	3 jenis	38%		7 Jenis	70%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen					12 Dokumen	12 Dokumen	50%
05.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi	142 Kali	45 Kali	71 kali	40 kali	56%		85 kali	60%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76 Laporan					19 Laporan	19 Laporan	25%
05.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah paket penatausahaan arsip dinamis	2 Paket	1paket	2 paket	2 paket	100%		3 paket	150%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamispada SKPD	8 Dokumen					2 Dokumen	2 Dokumen	25%

05.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen						-	0%
05.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD OPD yang diadakan	112 unit							
05.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan	5 Unit	3 Unit	-				3 Unit	60%
05.02.01.2.07.03	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	224 Unit	106 unit					106 unit	47%
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 paket							0%
05.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Kantor	72 Bulan		12 Bulan			12 Bulan		
05.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman surat	410 Surat	55 surat	200 surat	200 surat	100%		255 surat	62%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan					1 Laporan	1 Laporan	25%
05.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	24 Bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%		24 Bulan	100%

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan					1 Laporan	1 Laporan	25%
05.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan kantor	40 Orang	21 Orang	48 Orang	48 Orang	100%		69 Orang	173%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan					1 Laporan	1 Laporan	25%
05.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD OPD yang terpelihara	3822 Unit		637 Unit			637 Unit		
05.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang dipelihara	15 Kendaraan	15 Kendaraan	15 Kendaraan	15 Kendaraan	100%		15 Kendaraan	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit					16 Unit	-	0%
05.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang pelihara	304 Unit	-					-	0%
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	608 Unit					152 unit	152 unit	25%

05.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	852 Jenis	229 jenis	426 jenis	225 jenis	53%		454 jenis	53%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48 Unit					12 Unit	12 Unit	25%
05.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara	1 gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung	100%		1 gedung	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 gedung					1 gedung	1 gedung	100%
05.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%
		Ketepatan Waktu penyusunan dokumen penganggaran	TEPAT	TEPAT	TEPAT	TEPAT	100%	TEPAT	TEPAT	100%
06.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun tepat waktu	24 dokumen		4 dokumen			4 dokumen		
		Jumlah Dokumen APBD dan PAPBD yang disusun tepat waktu	12 Regulasi		2 Regulasi			2 Regulasi		

		Jumlah Regulasi di bidang penganggaran yang disusun tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku	12 Regulasi		2 Regulasi			2 Regulasi		
		Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran berbasis elektronik	5		4			5		
06.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	4 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%		4 dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	8 dokumen					2 dokumen	2 dokumen	25%
06.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Perubahan yang disusun	4 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%		4 dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	8 dokumen					2 dokumen	2 dokumen	25%
06.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang disusun	2 Ranperda dan 2 Ranperbu p	1 Ranperda dan 1 Ranperbu p	1 Ranperda dan 1 Ranperbu p	1 Ranperda dan 1 Ranperbu p	100%		2 Ranperda dan 2 Ranperbu p	100%

	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	8 dokumen					2 dokumen	2 dokumen	25%
06.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang disusun tepat waktu	2 Ranperda dan 2 Ranperbu p	1 Ranperda dan 1 Ranperbu p	1 Ranperda dan 1 Ranperbu p	1 Ranperda dan 1 Ranperbu p	100%		2 Ranperda dan 2 Ranperbu p	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	8 dokumen					2 dokumen	2 dokumen	25%
06.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Regulasi di Bidang Anggaran yang disusun sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	4 Regulasi	2 Regulasi	2 Regulasi	2 Regulasi	100%		4 Regulasi	100%

06.02.02.2.01.10	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	25%
06.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah yang dilaksanakan	12 kali	9 Kali	6 Kali	6 Kali	100%		15 kali	125%
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	24 dokumen					6 dokumen	6 dokumen	25%
06.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen dan laporan yang dihasilkan	3 Dokumen dan 6 Laporan		3 Dokumen dan 6 Laporan			18 Dokumen		
		Tingkat Kematangan Layanan Keuangan berbasis elektronik	5		4			5	5	100%
06.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen dan laporan yang dihasilkan	6 dokumen dan 2 Laporan	3 dokumen dan 1 Laporan	3 dokumen dan 1 Laporan	3 dokumen dan 1 Laporan	100%		6 dokumen dan 2 Laporan	100%
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	24 dokumen					6 dokumen	6 dokumen	25%

06.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Jenis Laporan yang dihasilkan	5 Jenis laporan	4 Laporan konfirmasi transfer 20 Laporan DAK Non Fisik	5 Jenis Laporan	5 Jenis Laporan	100%		5 Jenis Laporan	100%
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	48 dokumen					12 dokumen	12 dokumen	25%
06.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-Jumlah Laporan Semester, LRA, Ranperda dan Ranperbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 laporan; 1 Ranperda dan 1 Ranperbup	2 laporan; 1 Ranperda dan 1 Ranperbup	2 laporan; 1 Ranperda dan 1 Ranperbup	2 laporan; 1 Ranperda dan 1 Ranperbup	100%	2 laporan; 1 Ranperda dan 1 Ranperbup	2 laporan; 1 Ranperda dan 1 Ranperbup	100%
06.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis laporan yang disusun	4 Laporan	3 Laporan	2 laporan	2 laporan	100%		5 Laporan	125%
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	20 laporan					5 laporan	5 laporan	25%

06.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan yang dihasilkan	2 Ranperda dan 2 Ranperbu p	3 Laporan; 1 Ranperda; 1 Ranperbu p	1 Ranperda dan 1 Ranperbu p	1 Ranperda dan 1 Ranperbu p	100%		2 Ranperda dan 2 Ranperbu p	100%
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	280 Orang					70 Orang	70 Orang	25%
06.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Pencairan Dana Keuangan	60 Laporan		12 Bulan			3 Laporan		
06.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah desa yang menerima BK Khusus	100%	100 % ADD; 99,55 % BK Khusus; 99,74 % BK Umum	100%	99,89%	100%		100%	100%
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan					3 Laporan	3 Laporan	25%
06.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terpenuhinya kebutuhan dana darurat daerah	100%	43,67%	100%	62,93%	63%		53,30%	53%

	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	4 Laporan					1 Laporan	1 Laporan	25%
06.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang menerima dana bagi hasil	24 Bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%		24 Bulan	100%
	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	4 Laporan					1 Laporan	1 Laporan	25%
05.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase barang milik daerah yang tercatat dalam sistem informasi pencatatan aset	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Tercatat	453.747 unit	428.983 Unit	433.747 unit	447.376 Unit	103%	438.747 unit	446.236 Unit	98%
		Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah Berbasis Elektronik	5	4	4	4	100%	5	5	100%
06.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen standar BMD yang disusun	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		2 Dokumen	100%
	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	4 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	25%

06.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah kendaraan Roda 2 dan Roda 4 yang diurus pembayaran PKB nya; Jumlah Laporan yang disusun	1050 R2 dan 350 R4; 2 Laporan	648 R2; 377 R4	1 Laporan	1 Laporan	100%		648 R2; 377 R4; 1 Laporan	90%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	192 Laporan					48 Laporan	48 Laporan	25%
06.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 yang diinventarisasi	762 R2 dan 34 R4	-					0	0%
06.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang diperbaiki administrasinya	4250 Unit	1988 Unit	2000 unit	1840 Unit	92%		3828 Unit	90%
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1210 Laporan					300 Laporan	300 Laporan	25%
06.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang dinilai	120 Unit	-	100 Unit	110 unit	110%		110 Unit	110%
	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	100 Laporan					25 Laporan	25 Laporan	25%
06.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Koordinasi dalam rangka pengawasan & pengendalian BMD	50 kali	17 Kali	25 kali	1 kali	4%		18 kali	36%

	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	176 Laporan					44 Laporan	44 Laporan	25%
06.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang dipindahtangankan dan Jumlah BMD yang dihapus	160 unit dipelihara dan 25 unit dihapus	-	100 unit	100 unit	100%		100 Unit	54%
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	40 Dokumen					10 Dokumen	10 Dokumen	25%
05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Efektifitas pendapatan Daerah	100%	102,98%	100%	95%	95%	100%	99,08%	99%
		Rasio Kemandirian Fiskal	69%	69,44%	65%	74%	114%	67%		
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	- Prosentase Capaian Target Pendapatan PBB & BPHTB	100%		100%			100%		
		- Prosentase Capaian Target pendapatan Pajak Daerah Lainnya	100%		100%			100%		

		- Prosentase Peningkatan Potensi Pendapatan Daerah	100%		100%			100%		
		Tingkat Kematangan Layanan Pajak Daerah Berbasis Elektronik	5	4	4	4	100%	5	5	100%
5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah jenis pajak daerah yang dipetakan	6 jenis	1 Jenis	3 Jenis	2 Jenis	67%		3 jenis	50%
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	12 Dokumen					3 Dokumen	3 Dokumen	25%
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah aplikasi yang dibangun dan Jumlah aplikasi yang dipelihara	6 Aplikasi yg dibangun dan 8 aplikasi yang dipelihara	1 Aplikasi yg dibangun dan 4 aplikasi yang dipelihara	4 dan 5 aplikasi	3 aplikasi	33%		8 Aplikasi	57%
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	24 Dokumen					6 Dokumen	6 Dokumen	25%
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah peserta yang diberi penyuluhan	900 orang	426 orang	456 orang	350 orang	77%		776 Orang	86%

	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	40 Laporan					10 Laporan	10 Laporan	25%
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah SPTPD yang didata	21600 SPTPD	8397 SPTPD	12000 SPTPD	22756 STPD	190%		31153 SPTPD	144%
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan					1 Laporan	1 Laporan	25%
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah OP yang dikelola	20000 OP	13058 OP	20000 OP	23062 OP	115%		36120 OP	181%
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	8 Laporan					2 Laporan	2 Laporan	25%
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah obyek pajak yang dilakukan penilaian dan pemeriksaan serta penerima hibah	40 OP dan 92 OP; 1 lembaga	47 OP ; 1 lembaga	50 dan 60 OP ; 1 lembaga	25 dan 60 OP; 1 lembaga	56%		72 OP dan 60 OP; 1 lembaga	115%

	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	200 Objek Pajak					50 Objek Pajak	50 Objek Pajak	25%
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah SKPD yang ditetapkan	8000 SKPD	9583 SKPD	6000 SKPD	7024 SKPD	117%		16607 SKPD	208%
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	8 Dokumen					2 Dokumen	2 Dokumen	25%
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terpenuhinya pelayanan selama 1 tahun	12 bulan	12 bulan					12 Bulan	100%
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah OP yang diverifikasi	3000 OP						0	0%
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Persentase capaian target terhadap tunggakan potensial	55%	16,58%	55%	40%	73%		56,58%	103%
	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	32 Dokumen					8 Dokumen	8 Dokumen	25%
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah WP yang di periksa dan dilakukan pengawasan	1600 WP	310 WP	450 WP	455 WP	101%		765 WP	48%
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	32 Dokumen					8 Dokumen	8 Dokumen	25%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel **T-C.30** sebagai berikut:

Tabel 2.2 (T-C.30)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Gresik

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				202 1	202 2	202 3	202 4	202 5	202 6	202 2	202 3	2024	202 5	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
1	Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
2	Persentase Data Aset yang Akurat			90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	100%	99,99%	90,00%	90,00%	
3	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah			11,29%	1,95%	3,17%	3,49%	3,56%	3,63%	7,45%	3,17%	3,49%	3,56%	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 di bidang pendapatan dapat dikategorikan memuaskan. Hal tersebut dapat terlihat dari rasio capaian penerimaan pendapatan dari pajak daerah dan pendapatan lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah tercapai sebesar 85,63% PAD dari :

- Pajak daerah ditargetkan sebesar Rp 895.965.683.770,00 (delapan ratus milyar Sembilan ratus enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) terealisasi sebesar Rp. 783.844.086.372,06 (tujuh ratus delapan puluh tiga milyar delapan ratus empat puluh empat juta delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh dua enam sen rupiah)) atau terealisasi 87,49%

- Retribusi Daerah (khususnya Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan) ditargetkan Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) terealisasi sebesar Rp. 11.035.582.553,00 (sebelas milyar tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah) atau terealisasi 73,57%; dan
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (khususnya pada Pendapatan Denda Pajak Restoran, Pendapatan Denda Pajak Hiburan, Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan, Pendapatan Denda Pajak Parkir, Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah, Pendapatan Denda Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha) yang pada tahun 2022 tetapi terdapat realisasi sebesar Rp.186.678.480,70 (seratus delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah tujuh puluh sen), sedangkan pada Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan terdapat target sebesar Rp.56.11.836,00 terealisasi sebesar Rp.1.100.482.848,00 (satu milyar seratus juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).

Sedangkan tercapainya kinerja pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Daerah tidak terlepas dari tersedianya anggaran belanja untuk melaksanakan pelayanan tersebut. Capaian Indikator kinerja merupakan tingkat capaian target dari Indikator yang dicapai pada Tahun 2022 diukur dengan membandingkan nilai indikator kinerja antara realisasi dengan target yang ditampilkan dalam bentuk persentase.

Pada Tahun 2022, pagu belanja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik sebesar Rp.1.011.000.235.643,00 (satu trilyun sebelas milyar dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) terealisasi sebesar Rp.963.675.926.368,91 (Sembilan ratus enam puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh lima juta

Sembilan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah sembilan puluh satu sen) atau mencapai 95,32% dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dengan pagu sebesar Rp. 69.912.264.423,00 (enam puluh Sembilan milyar Sembilan ratus dua belas juta dua ratus enam puluh empat ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah) yang terealisasi sebesar Rp. 54.731.740.184,91 (lima puluh empat milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus delapan puluh empat rupiah Sembilan puluh satu sen) atau mencapai 78,29%
- Belanja Modal dengan pagu sebesar Rp. 1.930.376.100,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus rupiah) yang terealisasi sebesar Rp. 1.075.678.776,00 (satu milyar tujuh puluh lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) atau mencapai 55,72%
- Belanja Tidak Terduga dengan pagu RP.4.488.591.420,00 (empat milyar empat ratus delapan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh satu empat ratus dua puluh rupiah) yang terealisasi sebesar Rp.2.824.635.908,00 (dua milyar delapan ratus dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu Sembilan ratus delapan rupiah) atau mencapai 62,93%
- Belanja Transfer dengan pagu sebesar Rp. 934.710.391.800,00 (Sembilan ratus tiga puluh empat milyar tujuhratus sepuluh juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) yang terealisasi sebesar Rp. 905.043.871.500,00 (Sembilan ratus lima milyar empat puluh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) atau mencapai 96,83.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan/Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Gresik menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan yang mempengaruhi kinerja badan. Adapun permasalahan dan hambatan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Belum terwujudnya pelayanan prima;
2. Belum seluruhnya jenis pajak tersedia data potensi pajak daerah yang akurat;
3. Belum tepatnya jadwal kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan;
4. Belum seluruh pelayanan pajak dilakukan secara online;
5. Kurangnya sumber daya manusia pada pelayanan;
6. Monitoring, evaluasi dan pengawasan kinerja pemungutan pajak serta kinerja kegiatan perangkat daerah yang belum optimal;
7. Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual yang masih perlu ditingkatkan; dan
8. Tingkat kesadaran wajib pajak daerah yang belum merata.

Dengan adanya permasalahan dan hambatan yang telah teridentifikasi lebih awal dan telah dilakukannya langkah-langkah antisipasi, berpengaruh terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu terwujudnya transparansi dalam pemungutan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah; peningkatan pendapatan asli daerah, dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan daerah yang akuntabel dan tepat waktu; laporan keuangan dan kinerja tepat waktu; dan terwujudnya pelayanan prima.

2.3.3. Dampak terhadap Visi dan Misi Bupati dan Terhadap Capaian Program Nasional

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik merupakan salah satu Perangkat

daerah yang menunjang Misi Bupati yakni Misi ke 1 “menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang inovasi dan kolaboratif” dan Tujuan ke 1 “Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan Good and Clean Governance”

2.3.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Tantangan pengembangan pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah meliputi kompleksitas regulasi, efisiensi operasional, serta teknologi. Namun, peluangnya meliputi peningkatan pendapatan daerah, efektivitas pengelolaan keuangan, dan optimalisasi aset melalui inovasi teknologi dan kolaborasi lintas sektor.

2.3.5. Rekomendasi dan Catatan Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang direncanakan

Perumusan program kegiatan diprioritaskan untuk mendukung program peningkatan pendapatan daerah dan mendukung program Nawa Karsa atau 9 (Sembilan) navigasi perubahan yang merupakan sebuah strategi pembangunan Kabupaten Gresik baru untuk mendukung realisasi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2021-2026. Untuk Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengemban Nawa Karsa ke 5 yaitu **Gema Karya** dengan output kunci **‘Optimalisasi asset pemda’**.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada rancangan awal RKPD yang diusulkan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 terdapat 4 program dan 11 kegiatan dan 44 sub kegiatan dengan total pagu indikatif sebesar Rp.705.054.190.214,00 sedangkan berdasarkan analisa kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk tahun 2024 sebesar Rp.1.030.840.990.214,00.

Berikut disajikan review terhadap rancangan RKPD tahun 2024 untuk Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik pada tabel **Tabel T-C.31** sebagai berikut :

Tabel 2.3 (Tabel T-C.31)

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Kabupaten Gresik

Nama Perangkat Daerah: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2024	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				705.054.190.214	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				1.030.840.990.214	
	KEUANGAN				705.054.190.214	KEUANGAN				1.030.840.990.214	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	- Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100%	64.070.803.014	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	- Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100%	64.070.803.014	
	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	6 Dokumen	44.761.000	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	6 Dokumen	44.761.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	26.322.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	26.322.500	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	18.438.500	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	18.438.500	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Keuangan	12 Bulan	56.217.515.864	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Keuangan	12 Bulan	56.217.515.864	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang/bulan	56.217.515.864	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang/bulan	56.217.515.864	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	12 Bulan	4.427.787.950	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	12 Bulan	4.427.787.950	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	64.817.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	64.817.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	969.254.500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	969.254.500	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 Paket	206.457.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 Paket	206.457.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	255.779.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	255.779.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	655.573.550	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	655.573.550	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	13.370.600	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	13.370.600	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19 Laporan	250.252.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19 Laporan	250.252.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	2.012.284.300	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	2.012.284.300	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Tersedianya Jasa Penunjang Kantor	12 Bulan	1.332.859.200	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Tersedianya Jasa Penunjang Kantor	12 Bulan	1.332.859.200	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	62.358.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	62.358.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.270.501.200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.270.501.200	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah BMD OPD yang terpelihara	29 Unit	2.047.879.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah BMD OPD yang terpelihara	29 Unit	2.047.879.000	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	909.115.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	909.115.500	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	276.716.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	276.716.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	862.047.500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	862.047.500	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) atas laporan keuangan	WTP	632.137.420.900	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) atas laporan keuangan	WTP	957.924.220.900	
		Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Ketepatan Waktu penyusunan dokumen penganggaran	TEPAT			Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Ketepatan Waktu penyusunan dokumen penganggaran	TEPAT		
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun tepat waktu	4 dokumen	1.721.255.500	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun tepat waktu	4 dokumen	1.721.255.500	
		Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen APBD dan PAPBD yang disusun tepat waktu	2 Regulasi			Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen APBD dan PAPBD yang disusun tepat waktu	2 Regulasi		

							Kel/Desa				
		Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Regulasi di bidang penganggaran yang disusun tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku	2 Regulasi			Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Regulasi di bidang penganggaran yang disusun tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku	2 Regulasi		
		Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran berbasis elektronik	5			Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran berbasis elektronik	5		
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	49.613.000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	49.613.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	30.393.500	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	30.393.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	87.272.500	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	87.272.500	

	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	97.274.900	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	97.274.900	
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	94.773.800	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	94.773.800	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	6 Dokumen	1.361.927.800	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	6 Dokumen	1.361.927.800	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen dan laporan yang dihasilkan	18 Dokumen	404.456.800	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen dan laporan yang dihasilkan	18 Dokumen	404.456.800	
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	6 Dokumen	354.457.800	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	6 Dokumen	354.457.800	

	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	49.999.000	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	49.999.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-Jumlah Laporan Semester, LRA, Ranperda dan Ranperbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 laporan; 1 Ranperda dan 1 Ranperbup	112.999.600	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-Jumlah Laporan Semester, LRA, Ranperda dan Ranperbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 laporan; 1 Ranperda dan 1 Ranperbup	112.999.600	
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	5 Laporan	64.999.800	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	5 Laporan	64.999.800	
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	70 Orang	47.999.800	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	70 Orang	47.999.800	
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Terlaksananya Pencairan Dana Keuangan	4 Laporan	629.898.709.000	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Terlaksananya Pencairan Dana Keuangan	4 Laporan	955.685.509.000	

	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	3 Laporan	599.898.709.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	3 Laporan	806.240.919.000	
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	30.000.000.000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	30.000.000.000	
	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan		Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	119.444.590.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase barang milik daerah yang tercatat dalam sistem informasi pencatatan aset	100%	3.138.465.800	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase barang milik daerah yang tercatat dalam sistem informasi pencatatan aset	100%	3.138.465.800	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Barang Milik Daerah yang Tercatat	438.747 unit	3.138.465.800	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Barang Milik Daerah yang Tercatat	438.747 unit	3.138.465.800	
	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	289.999.900	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	289.999.900	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	48 Laporan	284.285.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	48 Laporan	284.285.000	

	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	300 Laporan	2.433.174.000	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	300 Laporan	2.433.174.000	
	Penilaian Barang Milik Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	25 Laporan	72.649.000	Penilaian Barang Milik Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	25 Laporan	72.649.000	
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	44 Laporan	21.700.000	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	44 Laporan	21.700.000	
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	10 Dokumen	36.657.900	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	10 Dokumen	36.657.900	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Efektifitas pendapatan Daerah	100%	5.707.500.500	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Efektifitas pendapatan Daerah	100%	5.707.500.500	
		Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rasio Kemandirian Fiskal	67%			Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rasio Kemandirian Fiskal	67%		

	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	- Prosentase Capaian Target Pendapatan PBB & BPHTB	100%	5.707.500.500	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	- Prosentase Capaian Target Pendapatan PBB & BPHTB	100%	5.707.500.500	
		Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	- Prosentase Capaian Target pendapatan Pajak Daerah Lainnya	100%			Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	- Prosentase Capaian Target pendapatan Pajak Daerah Lainnya	100%		
		Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	- Prosentase Peningkatan Potensi Pendapatan Daerah	100%			Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	- Prosentase Peningkatan Potensi Pendapatan Daerah	100%		
		Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Tingkat Kematangan Layanan Pajak Daerah Berbasis Elektronik	5			Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Tingkat Kematangan Layanan Pajak Daerah Berbasis Elektronik	5		
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Dokumen	310.140.000	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Dokumen	310.140.000	
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	6 Dokumen	60.258.000	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	6 Dokumen	60.258.000	

	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	10 Laporan	349.292.000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	10 Laporan	349.292.000	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	119.111.900	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	119.111.900	
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2 Laporan	499.999.900	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2 Laporan	499.999.900	
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	50 Obyek Pajak	819.999.800	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	50 Obyek Pajak	819.999.800	
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2 Dokumen	128.275.900	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2 Dokumen	128.275.900	
	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	8 Dokumen	1.000.528.000	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	8 Dokumen	1.000.528.000	

	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	8 Dokumen	2.419.895.000	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	8 Dokumen	2.419.895.000	
--	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	-----------	---------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	-----------	---------------	--

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Merujuk pada Permendagri No.86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa, pada dasarnya tahapan selanjutnya dari penyusunan Renstra adalah perumusan Tujuan dan Sasaran. Tujuan dan Sasaran ini harus memberikan kontribusi untuk mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik telah menetapkan visi pembangunan yang sekaligus menjadi visi pemerintah kabupaten pada periode 2021-2026 yaitu **“Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah”**. Untuk mencapai visi tersebut, telah ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan periode 2021-2026, yaitu:

- (1) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif
- (2) Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota
- (3) Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah
- (4) Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah

Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja, dan menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik.

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan ASet Daerah Kabupaten Gresik salah satu Perangkat Daerah yang mendukung misi kesatu “menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif”, Untuk mewujudkan hal tersebut, ditetapkan tujuan dari misi kesatu RPJMD 2021-2026 dimana Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Gresik ada di dalamnya yaitu “Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan Good and Clean Governance”

Tujuan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik adalah “Menguatkan inovasi Daerah berlandaskan pembangunan”, untuk mewujudkan tujuan tersebut maka ditetapkan dua sasaran strategis perangkat daerah, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, dengan indikator, sebagai berikut:
 - Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan
 - Persentase Data Aset yang Akurat
2. Meningkatnya Pendapatan Daerah, dengan indikator, sebagai berikut:
 - Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah

3.2. Program dan Kegiatan

Penyusunan program dan kegiatan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 telah mempertimbangkan beberapa faktor antara lain :

✓ Mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah, yaitu :

Visi : Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah

Misi ke 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang inovasi dan kolaboratif

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik terdapat 4 program dan 11 kegiatan dan 44 sub kegiatan dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 1.030.840.990.214,00 (satu triliun tiga puluh milyar delapan ratus empat puluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu dua ratus empat belas rupiah).

Berikut ini tabel rekapitulasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024

Table 2.7 **(T-C.33)**
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Gresik
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				1.030.840.990.214				1.062.384.901.136
	KEUANGAN				1.030.840.990.214				1.062.384.901.136
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Persentase ketercapaian sasaran program OPD		100%	64.070.803.014			100%	97.492.893.136
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan		6 Dokumen	44.761.000			6 Dokumen	204.957.853
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	3 Dokumen	26.322.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	96.903.564

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	3 Laporan	18.438.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	108.054.289
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan		12 Bulan	56.217.515.864			120 Orang/bulan	88.135.784.324
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	120 Orang/bulan	56.217.515.864	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		120 Orang/bulan	88.135.784.324
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor		12 Bulan	4.427.787.950			12 Bulan	3.956.034.668
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	1 Paket	64.817.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	82.452.019
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	5 Paket	969.254.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Paket	854.470.999
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	9 Paket	206.457.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9 Paket	389.207.278
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	12 Paket	255.779.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 paket	351.375.341
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	2 Paket	655.573.550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	260.035.608

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	12 Dokumen	13.370.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	47.882.999
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	19 Laporan	250.252.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		19 Laporan	970.610.424
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2.012.284.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	1.000.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Kantor		12 Bulan	1.332.859.200			12 Bulan	1.083.334.436
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	62.358.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	416.402.769
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1.270.501.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	666.931.667

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD OPD yang terpelihara		29 Unit	2.047.879.000			637 Unit	4.112.781.855
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16 Unit	909.115.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		16 Unit	988.956.577
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Unit	276.716.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		426 jenis	1.392.160.174
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	862.047.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 gedung	1.731.665.104
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan		WTP	957.924.220.900			WTP	954.216.800.000
		Ketepatan Waktu penyusunan dokumen penganggaran		TEPAT				TEPAT	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun tepat waktu		4 dokumen	1.721.255.500			4 dokumen	2.796.481.952

		Jumlah Dokumen APBD dan PAPBD yang disusun tepat waktu		2 Regulasi				2 Regulasi	
		Jumlah Regulasi di bidang penganggaran yang disusun tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku		2 Regulasi				2 Regulasi	
		Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran berbasis elektronik		5				5	-
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	49.613.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 dokumen	78.095.043
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	30.393.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 dokumen	78.095.043

	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	87.272.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 dokumen	182.221.766
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	97.274.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 dokumen	182.221.766
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	94.773.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	208.253.447
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	1.361.927.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 dokumen	2.067.594.888
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen dan laporan yang dihasilkan		18 Dokumen	404.456.800			3 Dokumen dan 6 Laporan	800.441.009
		Tingkat Kematangan Layanan Keuangan berbasis elektronik		5				5	-

	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	354.457.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 dokumen	670.282.696
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	49.999.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 dokumen	130.158.313
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-Jumlah Laporan Semester, LRA, Ranperda dan Ranperbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		2 laporan; 1 Ranperda dan 1 Ranperbup	112.999.600			2 laporan; 1 Ranperda dan 1 Ranperbup	281.721.033
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	64.999.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 laporan	87.850.415

	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70 Orang	47.999.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		70 Orang	193.870.618
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Pencairan Dana Keuangan		4 Laporan	955.685.509.000			3 Laporan	950.338.156.006
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	806.240.919.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Laporan	806.943.306.345
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	30.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	31.666.875.387
	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	119.444.590.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	111.727.974.274
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase barang milik daerah yang tercatat dalam sistem informasi pencatatan aset		100%	3.138.465.800			100%	3.345.906.000
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang		438.747 unit	3.138.465.800			448.747 unit	3.345.906.000

		Tercatat							
		Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah Berbasis Elektronik		5				5	-
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	289.999.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	445.298.508	
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48 Laporan	284.285.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		48 Laporan	1.170.097.063	
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300 Laporan	2.433.174.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		300 Laporan	1.488.203.956	
Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 Laporan	72.649.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		25 Laporan	64.342.200	

	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44 Laporan	21.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		44 Laporan	65.560.784
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Dokumen	36.657.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Dokumen	112.403.489
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Efektifitas pendapatan Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	5.707.500.500			100%	7.329.302.000
		Rasio Kemandirian Fiskal		67%				69%	
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	- Prosentase Capaian Target Pendapatan PBB & BPHTB		100%	5.707.500.500			100%	7.329.302.000
		- Prosentase Capaian Target pendapatan Pajak Daerah Lainnya		100%				100%	
		- Prosentase Peningkatan Potensi Pendapatan Daerah		100%				100%	

		Tingkat Kematangan Layanan Pajak Daerah Berbasis Elektronik		5				5	-
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	310.140.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	200.416.648
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	60.258.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Dokumen	1.389.283.112
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Laporan	349.292.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Laporan	296.136.265
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	119.111.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	123.910.812
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	499.999.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	928.053.706

Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Obyek Pajak	819.999.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50 Objek Pajak	3.403.378.170
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	128.275.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	111.155.027
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Dokumen	1.000.528.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 Dokumen	756.181.251
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Dokumen	2.419.895.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 Dokumen	120.787.010

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan hasil pengerjaan Tabel 2.8, yaitu sebagai berikut

Table 2.8
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No Rekening					Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Anggaran	
									2024	2025
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				1.030.840.990.214	1.062.384.901.136
5	0				KEUANGAN				1.030.840.990.214	1.062.384.901.136
5	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		- Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100%	64.070.803.014	97.492.893.136
5	0	0	2.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	6 Dokumen	44.761.000	204.957.853
5	0	0	2.	00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	26.322.500	96.903.564
5	0	0	2.	00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	18.438.500	108.054.289
5	0	0	2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Keuangan	12 Bulan	56.217.515.864	88.135.784.324
5	0	0	2.	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang/bulan	56.217.515.864	88.135.784.324
5	0	0	2.		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	12 Bulan	4.427.787.950	3.956.034.668
5	0	0	2.	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	64.817.000	82.452.019

5	0	0	2.	00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	969.254.500	854.470.999
5	0	0	2.	00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 Paket	206.457.000	389.207.278
5	0	0	2.	00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	255.779.000	351.375.341
5	0	0	2.	00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	655.573.550	260.035.608
5	0	0	2.	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	13.370.600	47.882.999
5	0	0	2.	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19 Laporan	250.252.000	970.610.424
5	0	0	2.	00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	2.012.284.300	1.000.000.000
5	0	0	2.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Kantor	12 Bulan	1.332.859.200	1.083.334.436
5	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	62.358.000	416.402.769
5	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.270.501.200	666.931.667
5	0	0	2.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah BMD OPD yang terpelihara	29 Unit	2.047.879.000	4.112.781.855

5	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	909.115.500	988.956.577
5	0	0	2.	00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	276.716.000	1.392.160.174
5	0	0	2.	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	862.047.500	1.731.665.104
5	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan	WTP	957.924.220.900	954.216.800.000
							Ketepatan Waktu penyusunan dokumen penganggaran	TEPAT		
5	2	0	2.		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun tepat waktu	4 dokumen	1.721.255.500	2.796.481.952
							Jumlah Dokumen APBD dan PAPBD yang disusun tepat waktu	2 Regulasi		
							Jumlah Regulasi di bidang penganggaran yang disusun tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	2 Regulasi		
							Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran berbasis elektronik	5		-
5	0	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	49.613.000	78.095.043

5	0	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	30.393.500	78.095.043
5	0	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	87.272.500	182.221.766
5	0	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	97.274.900	182.221.766
5	0	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	94.773.800	208.253.447
5	0	0	2.	00	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	6 Dokumen	1.361.927.800	2.067.594.888
5	0	0	2.		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Jumlah dokumen dan laporan yang dihasilkan	18 Dokumen	404.456.800	800.441.009
							Tingkat Kematangan Layanan Keuangan berbasis elektronik	5		-
5	0	0	2.	00	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	6 Dokumen	354.457.800	670.282.696
5	0	0	2.	00	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	49.999.000	130.158.313

5	0	0	2.		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		-Jumlah Laporan Semester, LRA, Ranperda dan Ranperbup Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	2 laporan ; 1 Ranperda dan 1 Ranperbup	112.999.600	281.721.033
5	0	0	2.	00	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	5 Laporan	64.999.800	87.850.415
5	0	0	2.	00	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	70 Orang	47.999.800	193.870.618
5	0	0	2.		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Terlaksananya Pencairan Dana Keuangan	4 Laporan	955.685.509.000	950.338.156.006
5	0	0	2.	00	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	3 Laporan	806.240.919.000	806.943.306.345
5	0	0	2.	00	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	30.000.000.000	31.666.875.387
5	0	0	2.	00	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	119.444.590.000	111.727.974.274
5	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Persentase barang milik daerah yang tercatat dalam sistem informasi pencatatan aset	100%	3.138.465.800	3.345.906.000
5	0	0	2.		Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah yang Tercatat	438.747 unit	3.138.465.800	3.345.906.000

							Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah Berbasis Elektronik	5		-
5	02	03	2.01	00	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	289.999.900	445.298.508
5	02	03	2.01	00	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	48 Laporan	284.285.000	1.170.097.063
5	02	03	2.01	00	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	300 Laporan	2.433.174.000	1.488.203.956
5	02	03	2.01	00	Penilaian Barang Milik Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	25 Laporan	72.649.000	64.342.200
5	02	03	2.01	00	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	44 Laporan	21.700.000	65.560.784
5	02	03	2.01	00	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	10 Dokumen	36.657.900	112.403.489
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Efektifitas pendapatan Daerah	100%	5.707.500.500	7.329.302.000
							Rasio Kemandirian Fiskal	67%		
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		- Prosentase Capaian Target Pendapatan PBB & BPHTB	100%	5.707.500.500	7.329.302.000
							- Prosentase Capaian Target pendapatan Pajak	100%		

							Daerah Lainnya			
							- Prosentase Peningkatan Potensi Pendapatan Daerah	100%		
							Tingkat Kematangan Layanan Pajak Daerah Berbasis Elektronik	5		
5	0	0	2.	00	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Dokumen	310.140.000	200.416.648
5	0	0	2.	00	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	6 Dokumen	60.258.000	1.389.283.112
5	0	0	2.	00	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	10 Laporan	349.292.000	296.136.265
5	0	0	2.	00	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	119.111.900	123.910.812
5	0	0	2.	00	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2 Laporan	499.999.900	928.053.706
5	0	0	2.	00	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	50 Obyek Pajak	819.999.800	3.403.378.170
5	0	0	2.	00	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2 Dokumen	128.275.900	111.155.027

5	0	0	2.	00	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	8 Dokum en	1.000.528.000	756.181.251
5	0	0	2.	00	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	8 Dokum en	2.419.895.000	120.787.010

BAB IV
PENUTUP

Berdasarkan uraian Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 pada Bab-Bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini merupakan salah satu dokumen perencanaan tingkat Perangkat Daerah (PD) untuk jangka waktu 1 tahun.
2. Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini digunakan sebagai dasar bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada penyusunan Rencana APBD Tahun 2024 dan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja tahun 2024.
3. Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 diharapkan juga sebagai pedoman bagi peningkatan kinerja organisasi.

Gresik,

KEPALA BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN GRESIK



A.M REZA PAHLEVI, A.P

Pembina Tk. I

NIP 19740803 199311 1 001